

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH
TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2008-2023**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Syafira Fachrun Nisa'
Nomor Mahasiswa : 21313026
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH
TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2023**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Syafira Fachrun Nisa'
Nomor Mahasiswa	: 21313026
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025

Penulis,


Syafira Fachrun Nisa'

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023

Nama : Syafira Fachrun Nisa'
Nomor Mahasiswa : 21313026
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 5 Agustus 2025
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.

PENGESAHAN UJIAN



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nomor: 148/Ka.ProdiEp/10/Prodi.Ep/UTA/IX/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2025/2026, hari Selasa, tanggal 02 September 2025, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : SYAFIRA FACHRUN NISA'
NIM : 21313026
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A-
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si
Anggota Tim : Jannahar Saddam Ash Shidiqie, SEI.,MEK.

Yogyakarta, 02 September 2025

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Mengetahui, Maha Memberi Petunjuk, dan Maha Pengasih. Berkat rahmat, karunia, serta kekuatan-Nya yang tiada henti, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga setiap kata dan pemikiran yang tertuang dalam karya ini menjadi amal yang baik dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Purmini yang dengan tulus menyematkan doa dalam setiap hembusan napasnya, yang tak pernah lelah menjadi cahaya dalam gelapku, serta menjadi rumah tempatku kembali dari segala penat.
2. Sahabat, kerabat, serta saudara kandung yang selalu hadir dengan dukungan, candaan, dan semangat yang menjadi penyemangat dalam perjalanan ini.
3. Dan untuk diriku sendiri, Syafira Fachrun Nisa' yang telah melewati keraguan, tekanan, dan kelelahan. Terima kasih karena telah bertahan dan terus melangkah, meski tidak selalu mudah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatub.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT tas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Purmini. Terima kasih atas dukungan tanpa henti, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang tak tergantikan. Setiap Langkah dalam proses ini tidak lepas dari peran dan pengorbanan kedua orang tua penulis.
3. Dosen pembimbing, Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si., terima kasih atas waktu, bimbingan, dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan dan koreksi tidak hanya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga mengajarkan penulisi untuk berpikir lebih kritis dan teliti.
4. Teruntuk diri sendiri, Syafira Fachrun Nisa' terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Di tengah rasa lelah, ragu, dan segala keterbatasan, penulis tetap memilih untuk menyelesaikan apa yang sudah di mulai. Skripsi ini bukan sekedar tugas akhir, tapi bukti bahwa penulis mampu melewati proses yang panjang dan tidak mudah. Terima kasih sudah tidak menyerah, meski sering merasa ingin berhenti. Semoga

pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis kuat, bisa, dan pantas untuk bangga.

5. Kepada kedua saudara kandung penulis, kakak Vidya Fachrun Nisa' dan adik Stanza Halimatuz Zahra yang selalu memberikan dukungan sederhana namun berarti, serta kehadiran kalian yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.
6. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, Umayra Lasto, Putri Maulana, Nelya Styra Akmal, dan R Aj Dyah Sekartaji K. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Dalam tawa, keluh kesah, hingga detik-detik menghadapi masa tersulit. Doa, dukungan, serta semangat yang kalian berikan telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah hingga titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari keberhasilan-keberhasilan kita yang lain di masa depan *aamiin*.
7. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan sehingga tugas akhir ini mampu diselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya dan menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025



Syafira Fachrun Nisa'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
2.1. Kajian Pustaka.....	12
2.2. Landasan Teori.....	23
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	23
2.2.2. Inflasi	26
2.2.3. Upah Minimum.....	27
2.2.4. Jumlah Tenaga Kerja	29
2.3. Hubungan Antar Variabel.....	31
2.3.1. Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	31

2.3.2. Hubungan Jumlah Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi	31
2.3.3. Hubungan Upah Minimum dengan Pertumbuhan Ekonomi	32
2.4. Kerangka Penelitian.....	33
2.5. Hipotesis	33
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis dan Cara Pengambilan Data	34
3.2. Definisi Variabel Operasional.....	34
3.2.1. Variabel Dependen (Pertumbuhan Ekonomi)	34
3.2.2. Variabel Independen (Inflasi).....	35
3.2.3. Variabel Independen (Upah Minimum)	35
3.2.4. Variabel Independen (Jumlah Tenaga Kerja)	35
3.3. Metode Analisis	36
3.4. Teknik Estimasi Regresi Data Panel	36
3.4.1. Common Effect Model.....	37
3.4.2. Fixed Effect	37
3.4.3. Random Effect.....	39
3.5. Model Estimasi.....	40
3.5.1. Uji Chow	40
3.5.2. Uji Hausman.....	41
3.5.3. Uji Lagrange Multiplier (LM)	41
3.6. Uji Statistik	42
3.6.1. Koefisien Determinasi R²	42
3.6.2. Uji Parsial (Uji t).....	43
3.6.3. Uji Simultan (Uji F)	43
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Analisis Deskriptif	44
4.2. Pemilihan Model Terbaik	46

4.2.1. Uji Chow	46
4.2.2. Uji Hausman	46
4.3. Analisis Model	48
4.3.1. Uji F (Simultan)	48
4.3.2. Uji T (Parsial)	49
4.3.3. Uji Determinasi (R^2)	53
4.4. Pembahasan Hasil	53
BAB V	56
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Implikasi	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	12
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif.....	44
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Chow</i>	46
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Hausman</i>	46
Tabel 4.4 Hasil Uji LM	47
Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Common Effect</i> Model.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023.....	2
Gambar 1.2 Inflasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023.....	4
Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data Penelitian	62
Lampiran II. Analisis Deskriptif.....	66
Lampiran III. Hasil Uji <i>Chow</i>	66
Lampiran IV. Hasil Uji <i>Hausman</i>	66
Lampiran V. Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	67
Lampiran VI. Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	67

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara ilmiah bagaimana inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sepanjang 2008-2023. Pertumbuhan ekonomi di posisikan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah yang sangat dipengaruhi oleh dinamika variabel makroekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk panel, dihimpun dari tujuh kota di Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel melalui pendekatan *Common Effect Model*, yang dipilih berdasarkan hasil uji *Chow* dan *Hausman* untuk memperoleh model paling sesuai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen tersebut signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah studi. Secara parsial, inflasi ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan upah minimum memiliki pengaruh signifikan namun negatif. Sementara itu, jumlah tenaga kerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini memberikan implikasi yang substansial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam pengendalian inflasi dan penguatan penyerapan tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, Jumlah Tenaga Kerja, Data Panel, Jawa Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dinamis yang mencerminkan perubahan struktural dan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian suatu negara secara berkelanjutan. Proses ini ditandai oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang terukur dari waktu ke waktu, yang secara umum tercermin dalam kenaikan pendapatan riil per kapita. Dalam konteks pembangunan ekonomi, fokus tidak hanya tertuju pada peningkatan output nasional, tetapi juga pada perbaikan efisiensi dan produktivitas secara menyeluruh guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Pramesti, 2022)

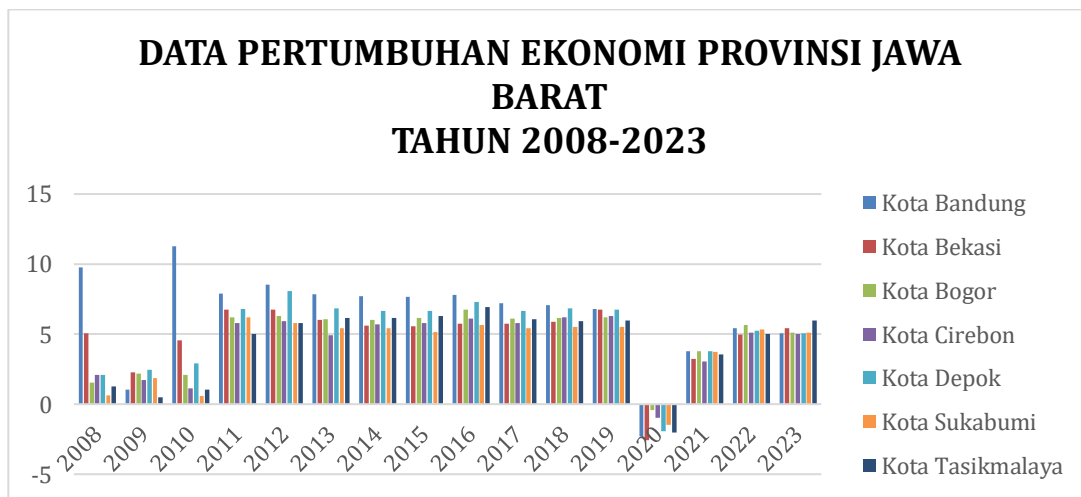
Keberhasilan proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena aktivitas ekonomi yang maju, yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa serta kesejahteraan penduduk yang membaik, sering kali menjadi tanda dari pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan yang berhasil lebih ditentukan oleh tingkat kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia, dan lingkungan yang baik, serta stabilitas keamanan wilayah tersebut (Suryama, 2024)

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, baik secara positif maupun negatif. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan dalam produksi barang dan jasa. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, pertumbuhan ekonomi riil digunakan sebagai ukuran karena mencerminkan total output barang dan jasa pada harga konstan, yang berarti pengaruh inflasi telah dihilangkan. Meskipun pertumbuhan ekonomi riil tidak memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan nilainya tetap dapat dijadikan sebagai indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat

dikatakan terjadi jika ada peningkatan output riil dalam periode tertentu (Suryama, 2024).

Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 48.220.094 jiwa, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri, 2022). Pada periode yang sama, provinsi ini mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,43%, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam penyediaan berbagai sumber daya penting, seperti air, lahan, bahan pangan, serta infrastruktur pendukung yang berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah lain. (Suryama, 2024)

Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan merupakan indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah secara riil. Penggunaan harga konstan memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap perubahan output barang dan jasa dari tahun ke tahun, tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Oleh karena itu, setiap provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai target-target ekonomi yang telah ditetapkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Sumber: BPS Jawa Barat

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2023 (Persen)**

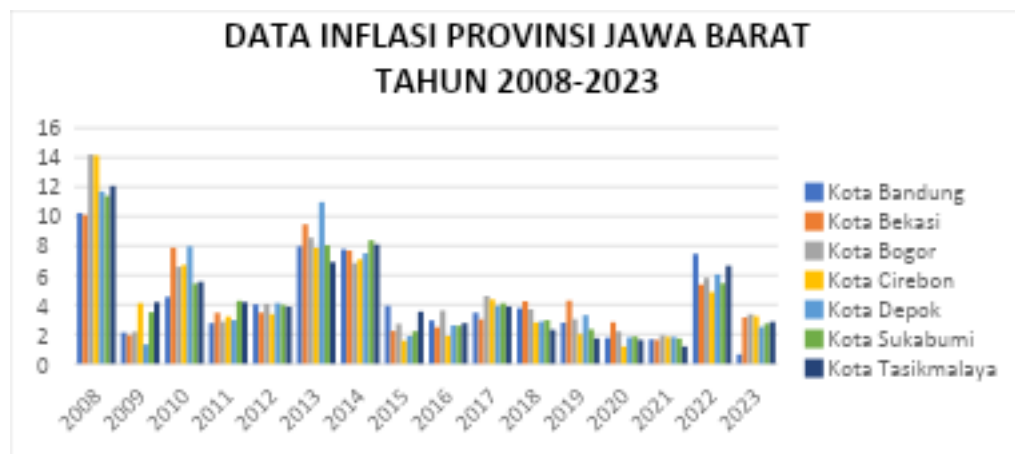
Pada Gambar 1.1 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi atas harga konstan dari tahun 2008-2023. Secara umum, hampir semua kota mengalami tren pertumbuhan positif hingga 2019. Namun, terjadi penurunan tajam pada 2020-2021 akibat dampak pandemic COVID-19, yang menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai sektor. Setelah itu, terlihat pemulihan pada 2022-2023, meskipun tingkat pertumbuhan masih bervariasi antar kota. Kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Depok menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan kota lain. Data ini menggambarkan dinamika ekonomi Jawa Barat dalam 15 tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor industrialisasi, kebijakan ekonomi, dan dampak global seperti pandemi.

Stabilitas harga, yang tercermin dalam tingkat inflasi, merupakan elemen fundamental bagi keberlanjutan dan kesehatan ekonomi suatu wilayah. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga menurunkan tingkat konsumsi domestik—salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Fitri & Anwar, 2021). Penurunan konsumsi ini berpotensi memperlambat laju perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, inflasi yang terjaga pada tingkat yang stabil menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional, telah mengalami fluktuasi tingkat inflasi yang cukup signifikan selama periode 2008–2023, sebagaimana tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dinamika inflasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat domestik seperti kebijakan fiskal dan moneter, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi global dan perubahan harga komoditas internasional. Mengingat pentingnya stabilitas inflasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan kajian empiris yang mendalam untuk memahami sejauh mana perubahan inflasi berdampak terhadap kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Inflasi merujuk pada kecenderungan umum meningkatnya harga barang dan jasa di pasar dalam suatu periode tertentu. Ketika laju inflasi dapat dikendalikan secara stabil,

maka proses pertumbuhan ekonomi cenderung berlangsung secara optimal. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan terhadap biaya produksi, sehingga mengganggu efisiensi sektor industri. Kenaikan biaya produksi sering kali mendorong alokasi investasi ke sektor-sektor yang kurang produktif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan investasi domestik dan memperlambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Aulya & Suantha, 2024)



Sumber: BPS Jawa Barat

Gambar 1.2 Inflasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023 (Persen)

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat inflasi di berbagai kota di Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2008-2023. Pada awalnya, khususnya pada tahun 2008-2009, inflasi berada pada level yang cukup tinggi, bahkan di beberapa kota melebihi 10%. Seiring waktu, inflasi cenderung menurun dan berada dalam kisaran yang lebih stabil, meskipun terdapat kenaikan signifikan pada beberapa tahun tertentu, seperti 2013 dan 2022.

Secara umum, tren inflasi di berbagai kota menunjukkan pola yang relatif serupa, yang dipengaruhi oleh beragam faktor ekonomi seperti kebijakan moneter, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika ekonomi nasional dan global. Pada periode 2020–2021, tingkat inflasi cenderung terkendali, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi dan menekan laju kenaikan harga barang. Namun, memasuki tahun 2022, inflasi kembali mengalami

peningkatan seiring dengan proses pemulihan ekonomi dan naiknya harga kebutuhan pokok, yang mencerminkan tekanan baru terhadap stabilitas harga di tingkat regional.

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pola yang fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut mencakup dinamika kebijakan ekonomi nasional, perubahan harga komoditas global, serta kondisi sosial dan politik domestik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang intensif serta penerapan kebijakan ekonomi yang tepat guna menjaga stabilitas inflasi. Pengendalian inflasi yang efektif tidak hanya berperan dalam mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Upah merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam proses produksi. Dalam konteks ekonomi, upah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Besaran upah juga berpengaruh terhadap struktur biaya operasional suatu unit usaha. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pendapatan di suatu wilayah adalah Upah Minimum, yang dalam penelitian ini merujuk pada Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di Provinsi Jawa Barat, penetapan UMR setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam skala yang tidak terlalu signifikan. Perubahan ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tergantung pada keseimbangan antara daya beli masyarakat dan beban biaya produksi bagi pelaku usaha (Suryama, 2024).

Upah adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam proses produksi. Secara ekonomi, upah sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Besaran upah juga mempengaruhi struktur biaya operasional suatu unit usaha.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pendapatan di suatu wilayah adalah Upah Minimum, yang dalam penelitian ini mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (**UMK**). Di Provinsi Jawa Barat, penetapan UMR setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam skala yang tidak terlalu signifikan. Perubahan ini dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tergantung pada keseimbangan antara daya beli masyarakat dan beban biaya produksi bagi pengusaha.

Analisis komprehensif mengenai pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sangat penting karena berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu aspek yang krusial adalah dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi daerah. UMKM cenderung lebih rentan terhadap perubahan kebijakan upah minimum dibandingkan perusahaan besar, karena keterbatasan modal dan efisiensi operasional. Kenaikan upah minimum yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dapat menimbulkan tekanan finansial bagi UMKM, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang implikasi kebijakan upah minimum terhadap kelangsungan dan pertumbuhan UMKM sangat diperlukan, mengingat peran strategis sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Hubungan antara upah minimum dan produktivitas tenaga kerja merupakan aspek yang krusial untuk dikaji dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah minimum idealnya sejalan dengan peningkatan produktivitas agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, investasi pada pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas, sehingga kenaikan upah dapat diterima tanpa mengorbankan daya saing usaha (Astuti & Wulandari, 2022). Tanpa adanya peningkatan produktivitas yang memadai, dunia usaha berisiko menghadapi tekanan

biaya produksi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Daya saing industri di Provinsi Jawa Barat menjadi aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam konteks kebijakan upah minimum. Penetapan upah minimum yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan daya saing industri, baik di pasar domestik maupun internasional, terutama pada sektor-sektor padat karya seperti manufaktur dan tekstil (Saefuloh et al., 2023). Kondisi ini dapat mengurangi efisiensi produksi dan meningkatkan biaya operasional, sehingga melemahkan posisi kompetitif industri daerah. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keberlanjutan daya saing industri merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah agar perekonomian tetap kompetitif di tengah dinamika persaingan global.

Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja merupakan aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Kenaikan upah minimum yang tidak diiringi dengan peningkatan efisiensi produksi dapat mengurangi kapasitas perusahaan dalam merekrut tenaga kerja, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran (Fitri & Anwar, 2021). Selain itu, dampak kebijakan upah minimum terhadap sektor formal dan informal di Provinsi Jawa Barat juga perlu ditelaah secara cermat. Umumnya, kebijakan upah minimum hanya berlaku di sektor formal, sehingga dapat mendorong pergeseran tenaga kerja ke sektor informal yang cenderung tidak teratur dan kurang mendapatkan perlindungan hukum (Ramadhani, 2021). Oleh karena itu, analisis terhadap perbedaan dampak kebijakan ini pada kedua sektor menjadi kunci untuk memahami implikasi menyeluruh terhadap pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi utama yang memengaruhi output ekonomi suatu wilayah. Secara umum, jumlah angkatan kerja yang besar berasal dari populasi yang tinggi, tetapi pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Rustiono, 2017). Jumlah tenaga kerja yang tersedia menjadi pilar penting dalam mendukung proses produksi

barang dan jasa. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi, tetapi juga berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran, yang secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Astuti & Wulandari, 2022).



Sumber: BPS Jawa Barat

Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023 (Jiwa)

Gambar 1.3 menunjukkan jumlah tenaga kerja di berbagai kota di Provinsi Jawa Barat dari 2008 hingga 2023. Kota-kota besar seperti Bekasi, Bogor, dan Bandung memiliki jumlah tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan kota lain. Tahun 2020 menunjukkan penurunan akibat dampak pandemi COVID-19, tetapi sejak 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan Kembali, mencerminkan pemulihan ekonomi dan bertambahnya peluang kerja. Secara keseluruhan, tren ketenagakerjaan di Jawa Barat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri, kondisi ekonomi, dan faktor eksternal seperti pandemi.

Perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama periode 2008 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, dipengaruhi oleh berbagai peristiwa besar seperti krisis keuangan global, pandemi COVID-19, serta proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah minimum dan pengendalian harga barang dan jasa.

Saefuloh et al. (2023) mencatat bahwa meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi, isu terkait kenaikan harga dan ketenagakerjaan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai pusat industri manufaktur dan jasa nasional, Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan yang signifikan dari kebijakan upah minimum dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, yang berdampak langsung pada struktur biaya produksi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (2020), yang menunjukkan bahwa sektor industri dan jasa di Jawa Barat sangat rentan terhadap perubahan upah minimum dan inflasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja guna mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mewujudkan ****pertumbuhan ekonomi**** yang merata dan inklusif. Hal ini dilakukan dengan menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan analisis berbasis data empiris yang meneliti pengaruh faktor-faktor seperti kenaikan harga, kebijakan upah minimum, dan dinamika tenaga kerja terhadap kinerja ekonomi daerah (BPS Jawa Barat, 2023). Dengan memanfaatkan data terbaru hingga tahun 2023, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lokal.

Keterkaitan antara variabel ekonomi makro tersebut juga membawa dampak sosial yang signifikan, khususnya dalam hal pengangguran dan kemiskinan. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap peningkatan jumlah tenaga kerja secara optimal, maka risiko meningkatnya angka pengangguran dan ketimpangan sosial menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi (Yuliana & Nuraini, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi makro, tetapi juga

penting dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji berdasarkan latar belakang sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023?
3. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian antara lain;

1. Manfaat teoritis
 - a. Penguatan landasan teori

Penelitian ini berpotensi untuk memperkaya literatur dalam bidang ekonomi, khususnya terkait dengan interaksi inflasi, tenaga kerja, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Temuan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menguji serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

b. Kontribusi pada pengembangan model

Model-model ekonomi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas topik serupa. Model tersebut dapat dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk menganalisis fenomena ekonomi yang lebih kompleks.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan referensi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kami menganalisis pengaruh inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2008 hingga 2023. Penelitian ini mengacu pada jurnal dan skripsi yang relevan dengan topik yang sama. Hal ini dilakukan untuk menentukan arah penelitian, variabel, dan hipotesis, serta untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya. Beberapa referensi dari penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
1.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa	Bintang Rahmat Putra (2024)	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik penelitian regresi data panel.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, penanaman	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, namun dengan fokus yang berbeda. Perbedaanannya antara lain pada penelitian ini tidak membahas terkait pengaruh

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
	Barat Tahun 2008-2023			modal dalam negeri (PMDN) dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar pengeluaran pemerintah difokuskan pada belanja yang memiliki multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu,	Inflasi, dan Upah Minimum terhadap pertumbuhan ekonomi, periode yang digunakan juga berbeda.

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
				pemerintah diharapkan dapat mendukung pengembangan kewirausahaan agar tenaga kerja dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka.	
2.	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016	Naufal Fikri Maulana	Penelitian ini menggunakan metode data panel	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat Pendidikan, UMK, PMA dan PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016.	Persamaan kedua penelitian ini menyoroti peran kunci tenaga kerja dalam analisis ekonomi, serta secara spesifik meneliti Provinsi Jawa Barat, sehingga hasil analisis dan temuan keduanya sangat

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
					relevan dengan kondisi ekonomi sosial di wilayah tersebut.
3.	Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2021	Nur Allim Arrafat (2023)	Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pengaruh jumlah wisatawan domestic berpengaruh negative dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat, jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki	sama-sama berfokus pada pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, yang merupakan masalah penting dalam konteks pembangunan daerah. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data, yang memungkinkan peneliti

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
				pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat. Secara parsial variabel jumlah wisatawan mancanegara dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak memiliki pengaruh	mengukur hubungan antara variabel yang diteliti secara statistik. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus variabel yang dianalisis.

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
				terhadap PDRB bruto di Provinsi Jawa Barat.	
4.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2012-2022	Ryantama Suryama (2024)	Metode studi memperguna kan studi pustaka dengan analisis data uji spesifikasi model, uji asumsi klasik, uji R square, uji F dan uji t.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum kabupaten (UMK) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.	Kesamaan antara kedua penelitian ini dalam ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Keduanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan,

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
					periode penelitian, serta pendekatan teoritis yang diterapkan.
5.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021	Ana Dwi Astuti (2022)	Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2016 hingga 2021	Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, dan memanfaatkan data sekunder dari BPS dan instansi terkait. Perbedaan	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal topik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, dan memanfaatkan data sekunder dari BPS dan instansi terkait. Perbedaan

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
				jumlah penduduk yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum dan Inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.	utama terletak pada fokus variabel, wilayah penelitian, cakupan waktu, dan hasil analisis.
6.	Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, Tingkat Pertumbuhan	Azrena Choerina Kurniasari	Regresi data panel dengan model Random Effect Model	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh	Kedua analisis sama-sama menggunakan variabel inflasi dan upah minimum serta

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
	Ekonomi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019			positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Jawa Tengah.	pendekatan kuantitatif dengan data time series terhadap ekonomi daerah dalam periode tertentu. Perbedaan terletak pada variabel fokus (dependent), tambahan variabel unik, dan tujuan akhir analisis.
7.	Analisis Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Upah	Tiara Dewi Pramesti (2022)	Penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari BPS, dianalisis	Secara simultan, variabel Inflasi, Tenaga Kerja, dan Upah	Kedua penelitian menggunakan variabel Inflasi, Upah Minimum,

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
	Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2020		menggunakan regresi data panel	Minimum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun secara parsial, hanya inflasi dan tenaga kerja yang menunjukkan pengaruh signifikan.	Jumlah Tenaga Kerja, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada wilayah dan rentang waktu data yang diteliti.
8.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019	Tsalsalaila, D., Wiralag, H., & Zahra, S. (2022)	Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear.	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan	Kedua analisis sama-sama berfokus di Provinsi Jawa Barat, menggunakan data time series, dan menganalisis hubungan Inflasi, Upah Minimum, dan Pertumbuhan

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
				terhadap upah minimum di Provinsi Jawa Barat.	Ekonomi dengan fokus kajian yang berbeda.
9.	Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat	Cahyanda Nofrita, Marwan (2022)	Penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda.	Upah minimum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat.	Kedua analisis sama-sama meneliti hubungan Inflasi dan Upah Minimum dengan menggunakan data tahunan (time series). Perbedaan fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada penyerapan tenaga kerja.
10.	Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi	Lulu Andini Abdullah, Syarwani Canon,	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier	Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Variabel yang diteliti sama, yaitu Inflasi, Upah Minimum, dan

No	Judul Penelitian	Penyusun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan
	(Inflasi, Tenaga Kerja, dan Upah Minimum) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Boby Rantow Payu (2024)	berganda menggunakan data sekunder dari tahun 2000-2019.	pertumbuhan ekonomi, sementara tenaga kerja dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Tenaga Kerja sebagai faktor penentu Pertumbuhan Ekonomi. Perbedaan terletak pada cakupan wilayah yang diteliti.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Meskipun penting, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran yang dapat digunakan. Pertumbuhan ini biasanya tercermin melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Jika peningkatan ini konsisten, kondisi ekonomi suatu negara dapat dikatakan membaik (Kurniawan et al., 2021). Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula kemungkinan peningkatan taraf hidup masyarakat (Febriyani & Anis, 2021)..

Walaupun PDB yang tinggi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, hal tersebut tidak menjamin distribusi pendapatan yang merata. Ketika aktivitas ekonomi terpusat pada sektor tertentu, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, karena manfaat pembangunan tidak tersebar secara adil ke seluruh lapisan masyarakat (Zulfariska & Bariyah, 2021).

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan membandingkan indikator ekonomi dari satu periode ke periode lainnya. Dua komponen utama yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Produk Nasional Bruto (GNP) dan Produk Domestik Bruto (GDP), yang masing-masing mencerminkan total output ekonomi suatu negara (Astuti, 2022).

Menurut (Syahputra et al. n.d.), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipahami sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang dalam penyediaan barang dan jasa. Dalam kajian teoritis, pertumbuhan ekonomi diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu teori klasik dan teori modern, dengan penjelasan yang lebih mendalam biasanya ditemukan dalam teori modern.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik dan modern adalah dua pendekatan utama dalam studi ekonomi. Teori klasik, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan W.A. Lewis, menekankan efektivitas mekanisme pasar bebas dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, teori pertumbuhan modern atau endogen melihat teknologi sebagai faktor internal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pendekatan ini, keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam proses akumulasi modal dan ekspansi ekonomi (Efendi & Aimon, n.d.).

a. Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan dasar awal dalam perkembangan pemikiran ekonomi modern yang muncul pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ekonom berpengaruh, seperti Adam Smith, David Ricardo, dan **Thomas Robert Malthus. Secara umum, pendekatan klasik memandang pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari interaksi antara tiga faktor produksi utama: tanah, tenaga kerja, dan modal yang beroperasi dalam kerangka sistem pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang minimal. (Todaro & Smith, 2015).

Dalam karya klasiknya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), Adam Smith menyoroti pentingnya spesialisasi kerja (division of labor) dan akumulasi modal sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, David Ricardo memperkenalkan konsep diminishing returns, khususnya dalam sektor pertanian, yang menyatakan bahwa penambahan input terhadap faktor produksi yang tetap akan menghasilkan tambahan output yang semakin menurun (Mankiw, 2016).

b. Teori Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai penyempurnaan dari teori klasik, dengan mengintegrasikan pendekatan matematis yang lebih terstruktur. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan, yang secara terpisah mengembangkan model pertumbuhan ekonomi pada tahun 1956. Model Solow-Swan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, di mana teknologi diposisikan sebagai variabel eksogen yang berasal dari luar sistem ekonomi (Solow, 1956).

Model ini memiliki karakteristik utama berupa asumsi adanya penurunan hasil marginal (diminishing returns) terhadap modal dan tenaga kerja. Dalam

jangka panjang, kontribusi modal fisik terhadap pertumbuhan akan menurun, sehingga kemajuan teknologi menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi per kapita yang berkelanjutan. Model Solow-Swan juga memperkenalkan konsep steady state, yaitu kondisi di mana tingkat pertumbuhan output, modal, dan tenaga kerja berada dalam keseimbangan. Dalam kerangka ini, kebijakan ekonomi yang mendorong peningkatan tabungan, investasi, dan efisiensi produksi dianggap penting untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan tersebut (Barro & Sala-i-Martin, 2004).

2.2.2. Inflasi

Inflasi merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara konsisten dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan pandangan Keynesian, inflasi muncul ketika masyarakat mengonsumsi melebihi kapasitas ekonomi yang tersedia, sehingga permintaan terus-menerus melampaui pasokan. Menurut Antasari dan Akbar (2019), inflasi dapat dipahami sebagai kenaikan harga yang berkelanjutan atau sebagai penurunan nilai mata uang secara umum, yang berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga bahan baku, misalnya, dapat meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya menyebabkan harga barang jadi ikut naik (Efendi & Aimon, n.d.).

Teori Keynes mengenai inflasi menyatakan bahwa fenomena ini timbul dari keinginan masyarakat untuk hidup melebihi kapasitas ekonomi yang tersedia. Inflasi, dalam konteks ini, dipandang sebagai hasil dari perebutan alokasi sumber daya antar kelompok sosial yang masing-masing menginginkan bagian yang lebih besar. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa melampaui jumlah pasokan yang tersedia di pasar.

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran menciptakan jenis inflasi yang dikenal sebagai demand-pull inflation. Inflasi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, pengeluaran juga cenderung naik tanpa mempertimbangkan ketersediaan barang, sehingga mendorong kenaikan harga.

Dalam konteks ini, inflasi dikategorikan sebagai inflasi domestik karena penyebab utamanya berasal dari dalam negeri.

Dalam analisis ekonomi makro, inflasi adalah indikator untuk menilai stabilitas ekonomi suatu negara. Fenomena ini sering menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi, terutama di negara-negara yang mengalami inflasi tinggi (Feronika, 2020). Meskipun demikian, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan, baik secara teoritis maupun empiris. Secara teori, inflasi yang tinggi biasanya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Melalui Teori Kuantitas Uang, Friedman menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar melebihi pertumbuhan output ekonomi. Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah uang dalam perekonomian adalah penyebab utama inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Efendi & Aimon, n.d.).

2.2.3. Upah Minimum

Upah minimum merupakan standar kompensasi terendah yang ditetapkan oleh perusahaan atau pelaku industri, termasuk produsen, sebagai imbalan kepada tenaga kerja. Penetapan nilai ini mempertimbangkan perbedaan kebutuhan hidup di setiap provinsi, sehingga lahirlah kebijakan upah minimum tingkat provinsi (Nurtiyas, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, upah minimum dapat ditentukan pada level provinsi, sektoral regional, maupun sub-sektoral. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini masih terbatas pada tingkat regional. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah minimum ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja antara 0 hingga 1 tahun. Definisi tersebut mencakup dua komponen utama yang menjadi esensi dari kebijakan upah minimum., yaitu:

1. Upah permulaan, yang merupakan tingkat upah terendah yang wajib diterima oleh pekerja ketika mereka pertama kali dipekerjakan di suatu perusahaan.

2. Jumlah upah minimum harus mempertimbangkan dan mencukupi kebutuhan hidup pekerja, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Upah minimum ini krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan, di mana pekerja merasa memperoleh kompensasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Upah minimum memiliki fungsi penting dalam melindungi tenaga kerja dari praktik eksploitasi oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab, terutama bagi pekerja dengan tingkat keterampilan yang rendah. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mengurangi risiko pengangguran, yang bertentangan dengan asumsi dalam teori ekonomi konvensional.

Tujuan utama dari pemberian upah adalah untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup pekerja. Oleh karena itu, proses distribusi upah harus dilakukan secara adil dan proporsional. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan jenis pekerjaan serta kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas perusahaan.

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan berdasarkan kategori jenis usaha, dengan mengacu pada klasifikasi lapangan usaha yang berlaku secara nasional di Indonesia. Penetapan ini dapat dilakukan di berbagai tingkat administratif, baik kabupaten/kota, provinsi, antarprovinsi, maupun secara nasional. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, besaran upah minimum sektoral harus lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum regional yang berlaku di wilayah yang sama (Suryama, 2024).

Lebih lanjut, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999,

terdapat sejumlah pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penetapan upah minimum, antara lain::

1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Hidup Minimum;
 - b. Indeks Hidup Minimum;
 - c. Kemampuan, Perkembangan, dan Kelangsungan Perusahaan;
 - d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
 - e. Kondisi pasar kerja;
 - f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
2. Dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), selain mempertimbangkan faktor-faktor umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat aspek tambahan yang perlu diperhatikan, yakni kemampuan perusahaan berdasarkan sektor usaha masing-masing. Hal ini penting guna memastikan bahwa kebijakan pengupahan sektoral tetap selaras dengan kapasitas finansial dan karakteristik ekonomi di tiap sektor industri. Seperti dijelaskan oleh Abdul Khakim (2006: 42–43), pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam penerapan sistem pengupahan di berbagai sektor.

2.2.4. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja merujuk pada individu yang berada dalam usia produktif serta memiliki kesiapan dan kemampuan untuk bekerja, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini memainkan peran sentral dalam proses produksi barang dan jasa. Menurut pandangan Lewis, keberadaan surplus tenaga kerja di negara berkembang bukanlah suatu hambatan, melainkan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Ia membagi struktur ekonomi negara berkembang menjadi dua sektor utama, yakni sektor kapitalis modern dan sektor subsisten tradisional. Sektor

subsisten tidak hanya terbatas pada bidang pertanian, tetapi juga mencakup sektor informal seperti pedagang kaki lima dan penjual koran.

Sektor subsisten memiliki keunggulan dalam jumlah tenaga kerja yang melimpah serta tingkat upah yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor kapitalis. Rendahnya tingkat upah di wilayah pedesaan memberikan insentif bagi pelaku usaha di perkotaan untuk memanfaatkan tenaga kerja dari sektor ini dalam rangka pengembangan industri modern. Dalam proses industrialisasi, kelebihan tenaga kerja dari sektor subsisten secara bertahap akan terserap oleh sektor modern, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya (Alim Nur, 2023).

Menurut (Alim Nur, 2023), tenaga kerja dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk kualitasnya, yang kemudian dikelompokkan menjadi:

1. Tenaga kerja terdidik, yaitu individu yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal, dan umumnya bekerja pada sektor yang memerlukan pemahaman teoritis atau profesional tertentu.
2. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang menguasai keterampilan teknis atau praktis yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman kerja langsung, tanpa harus melalui pendidikan formal yang tinggi.
3. Tenaga kerja tidak terampil (kasar), yaitu kelompok tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, tanpa latar belakang pendidikan formal, dan tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi merupakan suatu kondisi ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Ketika tingkat inflasi mengalami peningkatan yang signifikan, daya beli masyarakat cenderung menurun, yang berdampak negatif terhadap pendapatan riil investor dan hasil dari investasi yang dilakukan. Sebaliknya, penurunan tingkat inflasi memberikan sinyal positif bagi sektor investasi, karena mampu meningkatkan nilai riil pendapatan investasi yang diterima oleh investor (Mukamad Rofii & Sarda Ardyan, 2017).

Selain itu, aktivitas produksi memainkan peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut akan mendorong permintaan pasar, yang kemudian memacu peningkatan volume produksi. Proses ini menciptakan siklus positif berupa perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional, yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi (Mukamad Rofii & Sarda Ardyan, 2017).

2.3.2. Hubungan Jumlah Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Hellen et al. (2018) menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya memperkuat aktivitas konsumsi rumah tangga dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menekankan bahwa pendapatan dari aktivitas kerja merupakan salah satu faktor utama yang mendorong dinamika ekonomi suatu wilayah.

Sebaliknya, pandangan berbeda disampaikan oleh Bawuno et al. (2015), yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini disebabkan oleh dominasi tenaga kerja dari luar daerah, yang kontribusinya terhadap perekonomian lokal cenderung rendah. Selain itu, keberadaan tenaga kerja tersebut dinilai belum

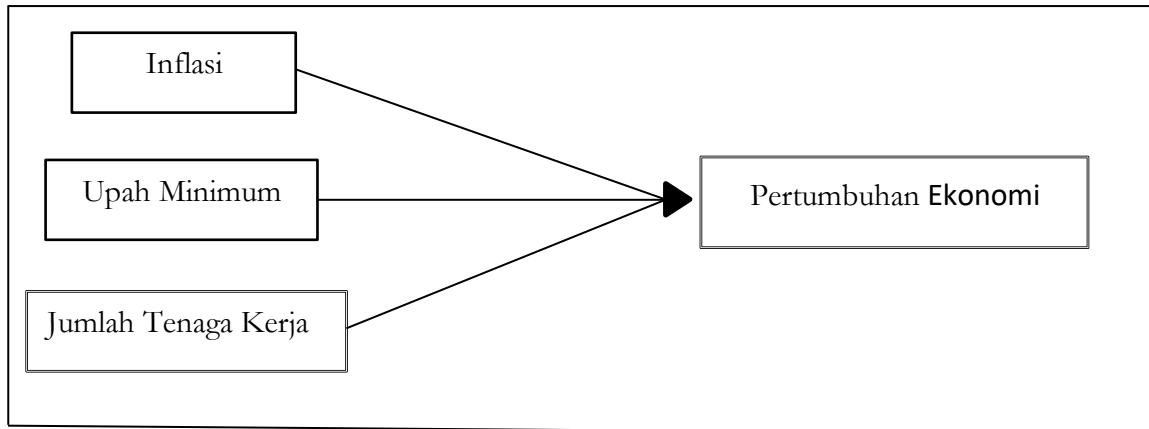
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan ekonomi di wilayah setempat.

2.3.3. Hubungan Upah Minimum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Amalia et al. (2019), besaran upah minimum memiliki pengaruh terhadap daya tarik suatu wilayah bagi tenaga kerja. Ketika upah minimum ditetapkan pada tingkat yang rendah, minat tenaga kerja untuk bekerja di daerah tersebut cenderung menurun, yang pada gilirannya dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pekerja dan menurunkan kapasitas produksi perusahaan. Sebaliknya, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia, meskipun tidak selalu diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja. Kondisi ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan output produksi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan upah minimum, meskipun sebagian kalangan masih menilai bahwa nilai tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Suwardi (2019) menyatakan bahwa kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk mendorong pencapaian standar hidup layak, meningkatkan daya beli melalui konsumsi masyarakat, serta sebagai bentuk pengakuan terhadap keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

2.4. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan sementara yang diajukan peneliti sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang diangkat. Kebenaran hipotesis ini masih memerlukan pembuktian melalui proses pengujian empiris menggunakan data yang relevan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Inflasi diduga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat periode 2008-2023.
2. Upah Minimum diduga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2008-2023.
3. Jumlah Tenaga Kerja diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2008-2023.

Pengujian hipotesis ini akan dilakukan menggunakan metode regresi data panel untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Cara Pengambilan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2008–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan fokus untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Analisis data dilakukan guna membandingkan serta mengidentifikasi keterkaitan antara variabel independen dan dependen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta publikasi dari lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross-section) yang mencakup 7 kota di Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian berlangsung (2008–2023).

3.2. Definisi Variabel Operasional

Penelitian ini menganalisis sejumlah variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Adapun variabel independen meliputi inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja di wilayah yang sama. Penjabaran lebih lanjut mengenai masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan disampaikan pada uraian berikut:

3.2.1. Variabel Dependen (Pertumbuhan Ekonomi)

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai variabel dependen (variabel Y). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan agregat dalam aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian

ini dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan, yang mencerminkan perubahan volume produksi tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Informasi mengenai pertumbuhan ekonomi tahunan dari masing-masing kota di Provinsi Jawa Barat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat untuk periode 2008–2023, dan dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

3.2.2. Variabel Independen (Inflasi)

Variabel X1 dalam penelitian ini adalah inflasi di Provinsi Jawa Barat. Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan dan saling memengaruhi. Secara umum, terdapat dua faktor utama penyebab inflasi, yaitu demand-pull inflation dan cost-push inflation. Demand-pull inflation terjadi ketika permintaan agregat meningkat melebihi kapasitas produksi, sehingga mendorong produsen menaikkan harga karena keterbatasan pasokan. Sementara itu, cost-push inflation disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja, yang mendorong produsen menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan, dan pada akhirnya menyebabkan inflasi. Data inflasi tahunan masing-masing kota di Provinsi Jawa Barat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat untuk periode 2008–2023, dan dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

3.2.3. Variabel Independen (Upah Minimum)

Dalam penelitian ini, variabel X2 adalah upah minimum yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Upah minimum merupakan jumlah upah bulanan terendah yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) sebagai standar minimum kompensasi bagi pekerja. Data mengenai upah minimum diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan juta rupiah..

3.2.4. Variabel Independen (Jumlah Tenaga Kerja)

Variabel X3 dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja, yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja. Data mengenai jumlah tenaga kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun 2008–2023, dan diukur dalam satuan orang. Informasi ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

3.3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu, dan data cross-section, yaitu data dari beberapa unit observasi pada satu titik waktu yang sama, sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati dan Porter (2012). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan perangkat lunak EViews versi 10 sebagai alat bantu analisis.

Persamaan dasar regresi linier data panel secara umum adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 JTK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PE	= Pertumbuhan ekonomi (persen)
INF	= Inflasi (persen)
UM	= Upah Minimum (dalam rupiah)
JTK	= Jumlah Tenaga Kerja (dalam orang)
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien Regresi
i	= <i>cross section</i> (7 kota di Provinsi Jawa Barat)
t	= <i>time series</i> (tahun 2008-2023)
ε	= <i>error term</i> pada tahun t

3.4. Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi merupakan proses untuk menentukan nilai koefisien regresi yang paling sesuai, termasuk penentuan nilai intersep dalam model. Dalam analisis data panel,

pengamatan dilakukan terhadap sekelompok subjek dengan mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu dimensi individu dan dimensi waktu. Untuk melakukan estimasi regresi pada data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model (Sriyana, 2014: 81–82)

3.4.1. Common Effect Model

Pendekatan Common Effect merupakan metode estimasi dalam regresi data panel yang dilakukan dengan menggabungkan data lintas individu (cross-section) dan data runtut waktu (time series) menjadi satu kesatuan yang dikenal sebagai pooled data. Dalam pendekatan ini, data dianggap homogen, tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar individu maupun antar waktu. Model regresi kemudian diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) sebagaimana diterapkan pada data biasa (Sriyana, 2014: 83).

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 TK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- PE_{it} = Pertumbuhan ekonomi wilayah ke-*i* pada tahun ke-*t*.
- α = *Intersep* (konstanta) umum untuk semua wilayah dan waktu.
- INF_{it} = Inflasi wilayah ke-*i* pada tahun ke-*t*.
- UM_{it} = Upah minimum wilayah ke-*i* pada tahun ke-*t*.
- TK_{it} = Jumlah tenaga kerja wilayah ke-*i* pada tahun ke-*t*.
- e_{it} = *Error term* (kesalahan residual).

3.4.2. Fixed Effect

Pendekatan Fixed Effect didasarkan pada asumsi bahwa setiap unit observasi memiliki intersep yang tetap selama periode waktu tertentu. Dalam model ini, yang diperhatikan adalah perbedaan intersep antar individu, sementara slope diasumsikan tetap, baik antar individu maupun antar waktu. Namun demikian, asumsi mengenai kestabilan intersep dan slope tersebut sering kali sulit dipenuhi dalam praktik. Untuk mengatasi keterbatasan ini, analisis data panel

dengan pendekatan Fixed Effect biasanya menggunakan variabel dummy sebagai alat untuk merepresentasikan perbedaan parameter antar unit (cross-section) maupun antar waktu (time series), sehingga memungkinkan model menjelaskan variasi yang terjadi secara lebih akurat (Sriyana, 2014: 85–86).

Dalam pendekatan Fixed Effect, proses estimasi dilakukan dengan menyertakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar unit observasi. Teknik ini memungkinkan identifikasi pengaruh unik masing-masing individu terhadap variabel dependen. Estimasi dalam model ini umumnya dilakukan menggunakan metode Least Squares Dummy Variables (LSDV). Dengan pendekatan tersebut, model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha_i + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 TK_{it} + e_{it}$$

Pada pendekatan *fixed effect* dapat memasukkan variabel *dummy* untuk menjelaskan adanya perbedaan antar *intersep* sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 + \delta_4 D_4 + \delta_5 D_5 + \delta_6 D_6 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 TK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PE_{it}	=	Pertumbuhan ekonomi kota i pada tahun t.
α	=	<i>Intersep</i> untuk kota refrensi (misalnya Kota Bandung).
$D_1, D_2, \dots, D_6$	=	<i>Dummy</i> untuk kota lainnya (misalnya Bekasi, Depok, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya).
$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_6$	=	Selisih intersep kota tersebut terhadap kota refrensi.
INF_{it}	=	Inflasi.
UM_{it}	=	Upah minimum.
TK_{it}	=	Jumlah tenaga kerja.
e_{it}	=	<i>Error term</i> .

Model *fixed effect* tetap memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal potensi ketidaksempurnaan representasi kondisi riil. Hal ini disebabkan oleh:

1. Heterogenitas objek yang diteliti, di mana karakteristik tiap unit sangat berbeda.
2. Dinamika temporal, yaitu perubahan kondisi pada objek yang sama antarwaktu.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang mampu memisahkan variasi *intersep* antarobjek tanpa mengganggu konsistensi nilai koefisien regressor. Dengan demikian, model tersebut akan lebih adaptif dalam merefleksikan kompleksitas data panel (Sriyana, 2014: 126).

3.4.3. Random Effect

Model Random Effect mengasumsikan bahwa variasi *intersep* dan konstanta dalam model disebabkan oleh komponen error atau residual yang muncul akibat perbedaan antar unit dan antar waktu. Oleh karena itu, model ini juga dikenal dengan sebutan Error Component Model (ECM). Dalam penerapannya, terdapat satu syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu jumlah unit cross-section harus lebih besar daripada jumlah koefisien yang diestimasi dalam model. Sebagai contoh, jika terdapat tiga variabel (baik independen maupun dependen) yang digunakan dalam analisis, maka setidaknya diperlukan empat unit cross-section. Syarat ini berkaitan dengan derajat kebebasan dalam data, karena apabila jumlah unit terlalu sedikit, maka hasil estimasi dapat menjadi tidak akurat atau bahkan menghasilkan nilai nol.

Model Random Effect didasarkan pada dua asumsi utama: pertama, bahwa nilai *intersep* dan *slope* bervariasi antar individu; dan kedua, bahwa keduanya juga dapat berbeda antara individu dan periode waktu. Keunggulan dari model ini terletak pada kemampuannya menjelaskan variasi *intersep* dan *slope* melalui komponen residual, sehingga memungkinkan pengurangan atau eliminasi masalah heteroskedastisitas dalam model estimasi (Sriyana, 2014: 153–161).

3.5. Model Estimasi

Model estimasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan parameter dalam model statistik dengan tujuan menjelaskan data yang diamati secara akurat. Dalam konteks regresi data panel, terdapat tiga jenis pengujian yang umum digunakan untuk memilih model estimasi yang paling tepat. Pertama, Uji Chow digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara model Common Effect dan Fixed Effect. Kedua, Uji Hausman bertujuan untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang lebih sesuai berdasarkan adanya korelasi antara efek individual dan variabel independen. Ketiga, Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan antara model Random Effect dan Common Effect guna mengetahui apakah perlu mempertimbangkan efek acak dalam mode.

3.5.1. Uji Chow

Uji Chow merupakan metode yang digunakan untuk menentukan model regresi yang paling sesuai dalam analisis data panel dengan membandingkan antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perbedaan antar individu (entitas) dalam data cukup signifikan untuk memerlukan model Fixed Effect. Jika hasil uji menunjukkan bahwa Fixed Effect lebih tepat dibandingkan Common Effect, maka model tersebut akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Namun, apabila Common Effect dianggap lebih sesuai, maka Uji Hausman tidak perlu dilakukan, dan model Common Effect dapat langsung diterapkan dalam estimasi regresi. Untuk menguji kelayakan penggunaan model Fixed Effect, digunakan Uji F-statistik. Adapun hipotesis dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

HO: *Common Effect* lebih baik daripada *fixed effect*

H1 : *Fixed effect* lebih baik daripada *common effect*

Apabila P-value yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka H0 ditolak, sehingga model *fixed effect* dianggap lebih sesuai untuk digunakan.

Sebaliknya, jika P-value lebih besar dari α , maka H_0 diterima, yang berarti model common effect lebih tepat untuk dipilih.

3.5.2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan metode yang digunakan untuk menentukan model estimasi paling tepat antara Fixed Effect dan Random Effect dalam analisis regresi data panel. Uji ini, bersama dengan Uji F, menjadi bagian penting dalam proses pemilihan model panel data yang paling sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Jika pada tahap awal pengujian diperoleh hasil bahwa model Common Effect merupakan pilihan terbaik, maka model tersebut yang akan digunakan. Namun, apabila model Fixed Effect dianggap lebih sesuai berdasarkan hasil awal, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan dengan membandingkan model Fixed Effect dan Random Effect melalui Uji Hausman. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect memberikan estimasi yang lebih konsisten, maka model tersebut akan dipilih sebagai model akhir dalam penelitian. Adapun bentuk hipotesis dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect* lebih baik daripada *fixed effect*

H_1 : *Fixed effect* lebih baik daripada *random effect*

Apabila P-value yang didapatkan lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka H_0 ditolak, sehingga model *fixed effect* dianggap lebih sesuai untuk digunakan. Sebaliknya, jika P-value melebihi nilai α , maka H_0 diterima, yang menandakan bahwa model random effect lebih layak dipilih.

3.5.3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan antara model Common Effect dan model Random Effect dalam rangka menentukan model yang paling sesuai untuk analisis regresi data panel. Pengujian ini membantu peneliti memilih model berdasarkan keberadaan efek individual yang tidak teramati dalam data.

Adapun bentuk hipotesis yang digunakan dalam Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah sebagai berikut::

HO : *Common Effect* lebih baik daripada *random effect*

H1 : *Random effect* lebih baik daripada *common effect*

Apabila nilai p-value yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti model Random Effect lebih layak digunakan dalam analisis. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari α , maka H_0 diterima, sehingga model *Common Effect* dianggap sebagai model yang lebih sesuai untuk digunakan.

3.6. Uji Statistik

Uji statistik merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan maupun hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa jenis uji statistik, antara lain koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t), yang masing-masing berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan hubungan serta signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara bersama-sama maupun individual.

3.6.1. Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana proporsi variasi total dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam suatu model. Dalam analisis regresi berganda, ukuran yang umum digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan ini adalah nilai R-Square (R^2). Nilai R^2 menunjukkan tingkat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan atau variasi yang terjadi pada variabel terikat, sementara sisanya mencerminkan variasi yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Nilai R^2 berada dalam rentang antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1, semakin besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun rumus koefisien determinasi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi.

SSE = Jumlah kuadrat galat (error).

SST = Total jumlah kuadrat varians data.

3.6.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas memiliki pengaruh signifikan dalam model regresi terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan tingkat signifikansi (α) yang telah ditentukan. Jika p-value lebih besar dari α (misalnya 0,05 atau 5%) atau nilai t-hitung lebih kecil dari nilai kritis dalam tabel t, maka hipotesis nol (H_0) diterima. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari α atau nilai t-hitung lebih besar dari nilai kritis tabel t, maka H_0 ditolak. Pengujian ini dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel independen dalam model.

3.6.3. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga berfungsi untuk menentukan kelayakan model regresi dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Umumnya, pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari α atau nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari α atau F-hitung melebihi F-tabel, maka H_0 ditolak, yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2008 hingga 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah analisis data panel, yaitu teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*), dengan cakupan tujuh kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

	PE	INF	UM	JTK
Mean	4,84464286	4,48482143	2,071,060	68716,0716
Median	5,625	3,51	1,745,304	31970,5
Maximum	11,26	14,2	5,158,248	466234
Minimum	-2,58	0,63	0	28,024
Std. Dev.	2,58676706	2,90171524	1,276,231	84373,495
Observation	112	112	112	112

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.1, memperlihatkan jumlah observasi untuk 7 kota selama tahun 2008-2023 dengan total 112 observasi. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,84464286% dengan nilai median 5,625%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, meskipun ada beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan negatif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai minimum -2,58%. Standar deviasi sebesar 2,58676706 mencerminkan adanya variasi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi antar wilayah pada periode tertentu.

Sementara itu, rata-rata inflasi (INF) tercatat 4,48482143% dengan median 3,51% yang menunjukkan bahwa mayoritas daerah memiliki tingkat inflasi di sekitar angka

tersebut. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah dengan inflasi tertinggi 14,2% dan inflasi terendah 0,63%. Standar deviasi sebesar 2,90171524 mengindikasikan bahwa tingkat inflasi mengalami fluktuasi yang cukup tinggi di berbagai daerah.

Dalam aspek Upah Minimum (UM), rata-rata yang tercatat adalah Rp. 2.071.060, dengan nilai median Rp. 1.745.304. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah minimum sangat bervariasi antar daerah, dengan beberapa wilayah memiliki upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Upah tertinggi mencapai Rp. 5.158.248, sedangkan nilai minimum tercatat 0, yang kemungkinan disebabkan oleh data yang tidak lengkap atau kesalahan pencatatan. Standar deviasi sebesar 1.276.231 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam tingkat upah minimum antar daerah.

Untuk Jumlah Tenaga Kerja (JTK), nilai rata-rata tercatat 68.716 orang dengan median 31.970,5 orang yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki jumlah tenaga kerja di sekitar angka ini. Namun, terdapat variasi yang cukup besar, dengan daerah yang memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi mencapai 466.234 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja terendah adalah 28.024 orang. Standar deviasi sebesar 84.373 orang mencerminkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam distribusi tenaga kerja di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menggambarkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam Pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi setiap wilayah berbeda-beda, dengan beberapa daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inflasi yang lebih terkendali, serta tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang sangat bervariasi.

4.2. Pemilihan Model Terbaik

4.2.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* lebih sesuai dalam analisis data panel. Apabila hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model *Fixed Effect* dinyatakan sebagai model yang lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect*.

Tabel 4.2 Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.075483	(6,102)	0.3822
Cross-section Chi-square	6.870433	6	0.3330

Berdasarkan Tabel 4.2 yang menyajikan hasil *Uji Chow*, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,3330. Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*.

4.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model yang paling sesuai adalah *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model *Fixed Effect* dinyatakan lebih tepat untuk digunakan dibandingkan *Random Effect*.

Tabel 4.3 Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.597650	3	0.1329

Berdasarkan Tabel 4.3 yang memuat hasil *Uji Hausman*, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1329. Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk mengevaluasi apakah model *Random Effect* lebih sesuai dibandingkan dengan model *Common Effect*. Pengujian ini dilakukan dengan pendekatan Breusch-Pagan, yang menguji signifikansi menggunakan nilai residual yang dihasilkan dari estimasi dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS).

Tabel 4.4 Hasil Uji LM

	Cross-section	Both
Breusch-Pagan	0.103544	151.5120
	(0.7476)	(0.0000)

Berdasarkan Tabel 4.4 yang menyajikan hasil uji *Lagrange Multiplier* (LM), diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,7476 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, yang berarti model *Common Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *Random Effect*.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian pemilihan model terbaik baik melalui Uji Chow maupun Uji LM dapat disimpulkan bahwa model paling sesuai dalam menganalisis pengaruh variabel inflasi (X_1), upah minimum (X_2), dan jumlah tenaga kerja (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Jawa Barat adalah *Common Effect Model*.

4.3. Analisis Model

Tabel 4.5 Hasil Pengujian *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	4.581239	0.712345	6.433	0.000
INF	0.051234	0.083112	0.616	0.539
UM	-2.87E-07	1.98E-07	-1.448	0.151
JTK	9.82E-06	2.91E-06	3.374	0.001
R-squared	0.111899			
Adjust R-squared	0.087230			
F-statistic	4.535934			
Prob F-statistic	0.004915			

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 JTK_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$PE_{it} = 4,581239 + 0,051234INF_{it} - 2,87E-07UM_{it} + 9,82E-06JTK_{it} + \varepsilon_{it}$$

PE = Pertumbuhan ekonomi (persen)

INF = Inflasi (persen)

UM = Upah Minimum (dalam rupiah)

JTK = Jumlah Tenaga Kerja (dalam orang)

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

i = cross section (7 kota di Provinsi Jawa Barat)

t = time series (tahun 2008-2023)

ε_{it} = error term pada tahun t

4.3.1. Uji F (Simultan)

Uji F-statistik digunakan untuk mengukur sejauh mana seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistic dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Adapun rumusan hipotesis dalam uji simultan ini adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_{INF} = \beta_{UM} = \beta_{JTK} = 0$, artinya semua variable independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

$H_0: \beta_{INF} \neq \beta_{UM} \neq \beta_{JTK} \neq 0$, artinya semua variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

Berdasarkan Tabel 4.5 yang menyajikan hasil estimasi dari model terbaik, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,004915, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti bahwa ketiga variabel independen—Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga Kerja—secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2008–2023.

Selain itu, nilai F-statistic sebesar 4,535934 juga lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,41, yang semakin menguatkan keputusan untuk menolak H_0 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga Kerja memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut selama periode penelitian.

4.3.2. Uji T (Parsial)

Dalam penelitian ini digunakan uji t satu sisi karena hipotesis yang diajukan bersifat *directional* atau sudah memiliki arah pengaruh yang jelas. Hal ini didasarkan pada teori ekonomi dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa:

- A. Inflasi diperkirakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab stabilitas harga dapat mendorong konsumsi dan investasi.

- B. Upah minimum diduga berpengaruh negatif, karena kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas bisa membebani pelaku usaha dan menekan laju pertumbuhan.
- C. Jumlah tenaga kerja diduga berpengaruh positif, karena bertambahnya jumlah pekerja dapat meningkatkan output daerah.

Karena arah hubungan telah ditetapkan sejak awal, maka pengujian dilakukan secara satu arah. Oleh karena itu, nilai probabilitas (*p*-value) yang dihasilkan oleh output Eviews secara default untuk dua sisi harus dibagi dua ($\frac{1}{2}$ *p*-value) agar sesuai dengan logika uji satu sisi. Hal ini penting agar hasil pengujian tetap konsisten dengan hipotesis teori dan tidak menyesatkan interpretasi statistiknya.

Uji parsial (uji *t*) dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas masing-masing variabel independen terhadap nilai signifikansi (α) yang telah ditetapkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel—Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Tenaga Kerja—memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang ditentukan berdasarkan perbandingan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 5% dan/atau 10%.

A. Uji Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$H_0: \beta_{INF} = 0$, artinya variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

$H_1: \beta_{INF} \neq 0$, artinya variabel inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

Variabel inflasi (INF) memiliki koefisien sebesar -0,154 dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 10% ($\alpha = 0,10$), yang menunjukkan bahwa inflasi cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2008–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan inflasi berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat dan

meningkatkan biaya produksi, sehingga berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hasil ini sejalan dengan temuan Amalia (2016), yang juga mencatat pengaruh negatif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Namun demikian, berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,539 yang dibagi dua dalam uji satu arah, menghasilkan p-value sebesar 0,2695. Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 10% ($0,2695 > 0,10$), maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Dengan demikian, secara statistik, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada periode tersebut. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh tingkat inflasi yang relatif stabil dan terkendali selama masa observasi, sehingga tidak cukup kuat untuk memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi secara langsung.

B. Uji Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$H_0: \beta_{UM} = 0$, artinya variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

$H_1: \beta_{UM} \neq 0$, artinya variabel upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

Variabel upah minimum (UM) menunjukkan koefisien sebesar -0,476 dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 10% ($\alpha = 0,10$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum berasosiasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, peningkatan upah minimum yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat memicu kenaikan beban biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau menahan laju investasi, yang pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Anggraini (2018) yang menegaskan bahwa peningkatan upah

minimum dapat menekan pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,151. Karena pengujian dilakukan secara satu arah dengan arah hipotesis yang telah ditentukan (pengaruh negatif), maka nilai probabilitas dibagi dua menjadi 0,0755. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% ($\alpha = 0,10$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak pada taraf signifikansi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2008–2023.

Hasil regresi menggunakan model terbaik, yaitu Common Effect Model, menunjukkan bahwa koefisien variabel Upah Minimum (UM) sebesar $-2,87E-07$ dengan nilai probabilitas awal 0,151. Koefisien ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar Rp1.000.000, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,287%. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan dampak kenaikan upah terhadap efisiensi dan kinerja sektor ekonomi, terutama di wilayah dengan sensitivitas tinggi terhadap biaya tenaga kerja.

C. Uji Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$H_0: \beta_{JTK} = 0$, artinya variabel jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

$H_1: \beta_{JTK} \neq 0$, artinya variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023.

Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0005 (hasil dari $0,001 \div 2$). Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 1% ($\alpha = 0,01$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian, pada taraf signifikansi 1%, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Jawa Barat selama periode 2008–2023. Selain itu, hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien jumlah tenaga kerja sebesar $9,82E-06$, yang berarti setiap penambahan satu orang tenaga kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00000982%. Dengan kata lain, variabel jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut selama periode penelitian.

4.3.3. Uji Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,1119 yang diperoleh dari hasil estimasi mengindikasikan bahwa hanya sekitar 11,19% variasi dalam pertumbuhan ekonomi di tujuh kota di Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model ini, yaitu inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja. Sementara itu, sebesar 88,81% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, yang tidak dimasukkan dalam ruang lingkup penelitian ini.

4.4. Pembahasan Hasil

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel inflasi (INF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam model yang digunakan. Ketidakterdapatannya pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, salah satunya adalah karena tingkat inflasi yang cenderung stabil atau masih berada dalam batas normal, sehingga dampaknya terhadap variabel makroekonomi lain, termasuk pertumbuhan ekonomi, menjadi kurang terlihat secara statistik.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sukirno (2010), yang menegaskan bahwa inflasi cenderung memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian hanya ketika mencapai tingkat yang ekstrem atau menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas dunia usaha. Selama inflasi berada dalam kisaran yang terkendali, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung minim atau tidak terlalu kuat.

Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Tambunan (2021), yang menunjukkan bahwa di sejumlah negara berkembang, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti investasi, jumlah tenaga kerja, dan kebijakan fiskal dibandingkan oleh inflasi. Oleh karena itu, tidak signifikannya pengaruh inflasi dalam model ini mengindikasikan bahwa terdapat variabel lain yang memiliki peran lebih dominan dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks tersebut, absennya pengaruh signifikan dari inflasi mencerminkan kemungkinan bahwa variabel ini bukanlah determinan utama dari perubahan output ekonomi di wilayah yang diteliti.

Selanjutnya, variabel upah minimum (UM) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum yang tidak disertai peningkatan produktivitas tenaga kerja berpotensi menimbulkan dampak kurang menguntungkan bagi perekonomian. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi klasik dan neoklasik yang menekankan bahwa kenaikan biaya tenaga kerja dapat meningkatkan biaya produksi, mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja, dan menurunkan efisiensi operasional, khususnya pada sektor padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akibatnya, pelaku usaha dapat menunda ekspansi, menurunkan investasi, atau melakukan efisiensi tenaga kerja, yang secara kumulatif berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Wijaksono dan Syafitri (2023), yang menemukan bahwa peningkatan upah minimum dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Faizin (2021), yang dalam penelitiannya di 33 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa upah minimum cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah dengan konsentrasi industri kecil dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.

Sementara itu, variabel jumlah tenaga kerja (JTK) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menggarisbawahi peran penting tenaga kerja dalam mendukung kinerja perekonomian. Temuan ini selaras dengan

pandangan teori ekonomi klasik yang menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama dalam meningkatkan output nasional. Eliza (2010) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja secara langsung mendorong peningkatan output ekonomi, karena lebih banyak individu terlibat dalam proses produksi. Hal ini turut diperkuat oleh model pertumbuhan ekonomi Solow (1956), yang menempatkan tenaga kerja sebagai komponen fundamental dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, semakin besar jumlah tenaga kerja yang produktif, maka semakin tinggi pula kapasitas produksi suatu wilayah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model* pada tujuh kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2008 hingga 2023, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

A. Inflasi

Secara parsial, variabel inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan, tingkat inflasi relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang cukup besar untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung.

B. Upah Minimum

Variabel upah minimum menunjukkan kecenderungan memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum belum secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, kemungkinan karena belum diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja.

C. Jumlah Tenaga Kerja

Variabel jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, semakin besar jumlah tenaga kerja yang terserap di suatu kota, maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga semakin tinggi.

D. Pengujian Secara Simultan

Secara simultan, ketiga variabel, yaitu inflasi, upah minimum, dan jumlah tenaga kerja, terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan ketiga faktor tersebut secara bersama-sama dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa implikasi yang dapat dipertimbangkan dalam kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan di Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode 2008-2023.

- A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini mengisyaratkan bahwa meskipun pengendalian inflasi tetap penting, faktor tersebut bukan merupakan penentu utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengarahkan fokus kebijakan pada upaya peningkatan investasi, penguatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan inovasi di sektor industri guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
- B. Temuan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak signifikan secara kuat, memberikan implikasi penting bagi para pembuat kebijakan untuk lebih cermat dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Kenaikan upah minimum yang tidak disertai peningkatan produktivitas tenaga kerja dan realisasi investasi berpotensi menimbulkan tekanan bagi dunia usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu, kebijakan pengupahan sebaiknya diintegrasikan dengan program peningkatan keterampilan tenaga kerja serta pemberian insentif kepada perusahaan guna mendorong efisiensi dan keberlanjutan operasional.
- C. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan aspek krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui

pendidikan vokasional, program pelatihan keterampilan, dan pemberian insentif bagi sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Di samping itu, mendorong investasi pada sektor-sektor padat karya dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengoptimalkan peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi regional..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. A., Canon, S., & Payu, B. R. (2024). Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi (Inflasi, Tenaga Kerja, Investasi dan Tingkat Pengangguran) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 2(2).
- Amelia, R. (2020). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 101-112.
- Astuti, I., & Wulandari, F. (2022). Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 45–56.
- Aulya, I. S., & Suantha, K. K. (2024). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2023. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 1(7), 284-294.
- Bawuno, E. E., Kalangi, J. B., & Sumual, J. (2015). Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (studi pada kota manado tahun 2003-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- BPS Jawa Barat. (2023). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023*. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Eliza, R. (2010). Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(1), 45-60.
- Faizin, M. (2019). Analisis Dampak Upah Minimum Dan Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen)*, 3(1), 35-43
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4).
- Fitri, A., & Anwar, S. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 20(2), 134–145.
- KURNIASARI, A. C. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019.

- Kurniawan, B., Restia Sunarya, S., Naofal, F., & Mukdas Sudarjah, G. (2021). Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Korea. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(3), 120-130.
- Machin, S., & Manning, A. (1994). The effects of minimum wages on wage dispersion and employment: Evidence from the UK wage councils. *Industrial and Labor Relations Review*, 47(2), 319-329.
- Nofrita, C., & Marwan, M. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(2), 179-187.
- Pramesti, T. D. (2022). *Analisis Pengaruh Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ramadhani, D. (2021). Hubungan upah minimum dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 19(3), 101–115.
- Saefuloh, U., Nugraha, R., & Permana, D. (2023). Tantangan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tengah kenaikan upah minimum. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 17(2), 67–80.
- Sari, N., & Rahayu, W. (2020). Pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 89–97.
- Sriyana, J. (2014). Metode Regresi Data Panel (Pertama). EKONISIA.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Suryama, R. (2024). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten/kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2012-2022* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.
- Tsalsalaila, D., Wiralag, H., & Zahra, S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 101-113.
- Udayana, I. (2020). Analisis dampak kebijakan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Economic and Economic Policy Journal*, 10(1), 45-60.

- Wijaksono, R. A., & Syafitri, W. (2023). Analisis Modal Manusia dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Development Economic and Social Studies (JDESS)*, 2(4).
- Yuliana, R., & Nuraini, E. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(2), 76-85.
- Zulfariska, D., & Bariyah, N. (2021). Pengujian Teori Kurva U-Terbalik (Hipotesis Kuznets) di Kalimantan Barat). *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 6(1).

LAMPIRAN

Lampiran I. Data Penelitian

Kota	Tahun	Inflasi	UM	JTK	PE
Kota Bogor	2008	14,2	830000	28024	1,54
Kota Bogor	2009	2,16	893412	21107	2,2
Kota Bogor	2010	6,57	971200	20213	2,07
Kota Bogor	2011	2,85	436206	22245	6,22
Kota Bogor	2012	4,06	422528	22004	6,31
Kota Bogor	2013	8,55	292767	19466	6,04
Kota Bogor	2014	6,83	415162	19202	6,01
Kota Bogor	2015	2,7	520483	3277	6,14
Kota Bogor	2016	3,6	532603	283946	6,73
Kota Bogor	2017	4,59	1723578.15	284492	6,12
Kota Bogor	2018	3,69	3557146,66	284492	6,14
Kota Bogor	2019	3,02	3842785,54	15947	6,19
Kota Bogor	2020	2,18	4169806,58	13101	-0,41
Kota Bogor	2021	1,93	4169806,58	12284	3,76
Kota Bogor	2022	5,82	4330249,57	10942	5,65
Kota Bogor	2023	3,36	4639429,39	178319	5,1
Kota Sukabumi	2008	11,39	700000	5774	0,61
Kota Sukabumi	2009	3,49	0	3706	1,88
Kota Sukabumi	2010	5,43	850000	3361	0,58
Kota Sukabumi	2011	4,26	860000	2819	6,18
Kota Sukabumi	2012	3,98	890000	3178	5,8
Kota Sukabumi	2013	8,03	1050000	3343	5,41
Kota Sukabumi	2014	8,38	1565922	3027	5,43
Kota Sukabumi	2015	2,2	1572000	83437	5,14
Kota Sukabumi	2016	2,57	1834175	132859	5,64

Kota Sukabumi	2017	4,1	1525632	133151	5,43
Kota Sukabumi	2018	2,95	2158430,53	133229	5,52
Kota Sukabumi	2019	2,33	2331752,5	2659	5,53
Kota Sukabumi	2020	1,84	2530182,63	1794	-1,49
Kota Sukabumi	2021	1,71	2530182,63	2494	3,71
Kota Sukabumi	2022	5,45	2562434,01	2342	5,35
Kota Sukabumi	2023	2,72	2893229,1	74403	5,12
Kota Bandung	2008	10,23	939000	132408	9,77
Kota Bandung	2009	2,11	1044630	92533	1,03
Kota Bandung	2010	4,53	1118000	89545	11,26
Kota Bandung	2011	2,75	1188435	92661	7,91
Kota Bandung	2012	4,02	1271625	105284	8,53
Kota Bandung	2013	7,97	1538703	78189	7,84
Kota Bandung	2014	7,76	2000000	85356	7,72
Kota Bandung	2015	3,93	2310000	4459	7,64
Kota Bandung	2016	2,93	2626940	126267	7,79
Kota Bandung	2017	3,46	1477352,7	127093	7,21
Kota Bandung	2018	3,76	3091345,56	129208	7,08
Kota Bandung	2019	2,78	3339580,61	87958	6,79
Kota Bandung	2020	1,75	3623778,91	85337	-2,28
Kota Bandung	2021	1,65	3742276,48	78729	3,76
Kota Bandung	2022	7,45	3774860,78	75542	5,41
Kota Bandung	2023	0,63	4048462,69	466234	5,07
Kota Cirebon	2008	14,14	682000	8094	2,1
Kota Cirebon	2009	4,11	765000	5425	1,72
Kota Cirebon	2010	6,7	840000	5383	1,11
Kota Cirebon	2011	3,2	906190	4762	5,78
Kota Cirebon	2012	3,36	980000	4655	5,92

Kota Cirebon	2013	7,86	1082500	4621	4,9
Kota Cirebon	2014	7,08	1226500	4434	5,71
Kota Cirebon	2015	1,56	1415000	53506	5,81
Kota Cirebon	2016	1,87	1608945	161153	6,09
Kota Cirebon	2017	4,36	1776686	162207	5,8
Kota Cirebon	2018	2,8	1893383,54	162220	6,21
Kota Cirebon	2019	2	2045422,24	12095	6,29
Kota Cirebon	2020	1,17	2219487,67	6475	-0,98
Kota Cirebon	2021	1,81	2271201,73	4158	3,05
Kota Cirebon	2022	4,86	2304943,51	7630	5,1
Kota Cirebon	2023	3,22	2456516,6	78205	5,01
Kota Bekasi	2008	10,1	990000	62141	5,08
Kota Bekasi	2009	1,93	1089000	49174	2,27
Kota Bekasi	2010	7,88	1155000	50668	4,55
Kota Bekasi	2011	3,45	1286421	51555	6,45
Kota Bekasi	2012	3,46	1422252	57625	6,74
Kota Bekasi	2013	9,46	2100000	57074	6,04
Kota Bekasi	2014	7,68	2441956	57664	5,61
Kota Bekasi	2015	2,22	2840000	32777	5,56
Kota Bekasi	2016	2,47	3327160	121827	6,09
Kota Bekasi	2017	3,01	1767029,7	128530	5,73
Kota Bekasi	2018	4,23	3915353,71	131004	5,86
Kota Bekasi	2019	4,28	4229756,61	67336	5,41
Kota Bekasi	2020	2,81	4589708,9	69972	-2,58
Kota Bekasi	2021	1,61	4782935,64	73835	3,22
Kota Bekasi	2022	5,37	4816921,17	80027	4,96
Kota Bekasi	2023	3,14	5158248,2	407036	5,43
Kota Depok	2008	11,7	962500	37263	2,09

Kota Depok	2009	1,3	1078000	27570	2,45
Kota Depok	2010	7,97	1157000	27529	2,93
Kota Depok	2011	2,95	1243552	30329	6,81
Kota Depok	2012	4,11	1424797	30629	8,06
Kota Depok	2013	10,97	2042000	31164	6,85
Kota Depok	2014	7,49	2397000	33947	7,28
Kota Depok	2015	1,87	2705000	114569	6,64
Kota Depok	2016	2,6	3046180	173011	7,28
Kota Depok	2017	3,93	1538909	173286	6,65
Kota Depok	2018	2,86	3584700,29	174218	6,83
Kota Depok	2019	3,29	3872551,72	28496	6,74
Kota Depok	2020	1,78	4202105,87	23897	-1,92
Kota Depok	2021	1,81	4339514,73	22468	3,76
Kota Depok	2022	6,06	4377231,93	23483	5,24
Kota Depok	2023	2,49	4694493,7	293169	5,05
Kota Tasikmalaya	2008	12,07	621500	9792	1,25
Kota Tasikmalaya	2009	4,17	705000	5608	0,51
Kota Tasikmalaya	2010	5,56	780000	5520	1,02
Kota Tasikmalaya	2011	4,17	865000	5878	5,02
Kota Tasikmalaya	2012	3,87	950000	7183	5,8
Kota Tasikmalaya	2013	6,89	1045000	6421	6,17
Kota Tasikmalaya	2014	8,09	1237000	6138	6,16
Kota Tasikmalaya	2015	3,53	1450000	4411	6,3
Kota Tasikmalaya	2016	2,75	1641280	122952	6,91
Kota Tasikmalaya	2017	3,88	1433901.15	123968	6,07
Kota Tasikmalaya	2018	2,3	1931435,35	124142	5,93
Kota Tasikmalaya	2019	1,72	2086529,61	7618	5,97
Kota Tasikmalaya	2020	1,61	2264093,28	8789	-2,01

Kota Tasikmalaya	2021	1,17	2264093,28	7062	3,57
Kota Tasikmalaya	2022	6,65	2363389,67	7360	5,01
Kota Tasikmalaya	2023	2,84	2533341,02	155618	5,96

Lampiran II. Analisis Deskriptif

	PE	INF	UM	JTK
Mean	4,84464286	4,48482143	2,071,060	68716,0716
Median	5,625	3,51	1,745,304	31970,5
Maximum	11,26	14,2	5,158,248	466234
Minimum	-2,58	0,63	0	28,024
Std. Dev.	2,58676706	2,90171524	1,276,231	84373,495
Observation	112	112	112	112

Lampiran III. Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.075483	(6,102)	0.3822
Cross-section Chi-square	6.870433	6	0.3330

Lampiran IV. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.597650	3	0.1329

Lampiran V. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Cross-section	Both
Breusch-Pagan	0.103544	151.5120
	(0.7476)	(0.0000)

Lampiran VI. Hasil Uji *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	4.581239	0.712345	6.433	0.000
INF	0.051234	0.083112	0.616	0.539
UM	-2.87E-07	1.98E-07	-1.448	0.151
JTK	9.82E-06	2.91E-06	3.374	0.001
R-squared	0.111899			
Adjust R-squared	0.087230			
F-statistic	4.535934			
Prob F-statistic	0.004915			